

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru Riau

Afrizal¹, Riza Liany Alhamda², Wasiah Sufi³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³ Universitas Lancang Kuning

Email: ijalnuer69@gmail.com (email penulis utama/korespondensi)

Kata kunci

*Kebijakan,
Penuntasan
Pembangunan
Pasar Cik Puan*

Abstrak

Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam penuntasan pembangunan pasar tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Pekanbaru beserta pihak-pihak terkait dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan. Adanya kebijakan pembangunan pasar Cik Puan merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota akan melanjutkan pembangunan pasar Cik Puan setelah penyerahan aset tanah dari Provinsi didapatkan beberapa waktu lalu. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya pembahasan yang jelas dengan pihak terkait mengenai waktu pelaksanaan pembangunan, sehingga belum ada kebijakan tentang pendanaan apakah melalui APBD atau melalui pola Prakarsa/ kerjasama, Tender investasi masih tahap peninjauan serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa pandemi.

Keywords

*Policy, Completing
Market Development
Cik Puan*

Abstract

The research was carried out in Pekanbaru City, Riau Province, which aims to determine the City Government's policies in completing the development of the Cik Puan market in Pekanbaru City and to find out what are the obstacles faced in completing the market development. The research approach uses a qualitative approach, namely research that aims to build a preposition and explain the meaning behind the social reality that occurs. A qualitative approach by describing and interpreting the policies taken by the Pekanbaru City Government and related parties in completing the development of the Cik Puan market. The existence of the Cik Puan market development policy is an effort by the Pekanbaru City Government in improving services to the community. The results of the study show that the City Government will continue

the construction of the Cik Puan market after the transfer of land assets from the Province was obtained some time ago. The obstacles faced are that there is no clear discussion with related parties regarding the timing of development implementation, so that there is no policy regarding funding whether through the APBD or through the Initiative/cooperation pattern, the investment tender is still in the exploratory stage and the limited budget available during the pandemic.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan dan termasuk aspek kebijakan yang penting dalam berjalannya suatu pemerintahan. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sebagai rangkaian menuju perubahan yang lebih baik. Layaknya proses pembangunan yang dilakukan harus didahului dengan perencanaan yang optimal. Dalam perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan, baik yang sudah ada maupun yang sedang berjalan. Kegiatan pembangunan bagi suatu Daerah tidak bisa dilakukan secara individual namun dilaksanakan melalui *team work*, baik dalam arti kerjasama tim antar anggota perencana maupun kerjasama dalam arti institusional. Memang, kegiatan perencanaan pembangunan itu bukan sesuatu yang mudah, karena akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang sangat kompleks, namun demikian kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekwensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Berbagai aspek penting dalam kegiatan pembangunan diantaranya adalah pembangunan infrastruktur terutama Infrastruktur ekonomi. Pembangunan pasar Cik Puan bertujuan mendukung infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat. Pasar Cik Puan merupakan pasar tradisional yang ada di Pekanbaru dengan kondisi beberapa kali mengalami kebakaran. Pembangunan kembali infrastruktur pasar ini dimulai pada tahun 2011 pada masa Herman Abdullah sebagai Walikota dan dilanjutkan pembangunannya oleh Walikota periode ke-2 yaitu Firdaus MT. Berdasarkan data yang diperoleh, Pasar Cik Puan mengalami sebanyak 9 kali musibah kebakaran. Tahun 1998 merupakan kebakaran pertama, selanjutnya tahun 1992, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 dan terakhir pada tahun 2015 (Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru). Pasar Cik Puan pertama kali dibangun pada tahun 1970 dengan luas tanah 7.963m². Pasar ini sangat strategis karena berada ditengah-tengah pusat ibukota. Keberadaan pasar Cik Puan menjadi tumpuan mendapatkan penghasilan bagi sebagian besar masyarakat khususnya para pedagang di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu adanya kebijakan pembangunan Pasar Cik Puan yang lebih baik dari sebelumnya, merupakan sesuatu yang didambakan oleh masyarakat. Pembangunan pasar Cik Puan diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang ada selama ini seperti kemacetan arus lalu lintas, tidak adanya rasa nyaman dan aman dikalangan pedagang maupun masyarakat, kesemrawutan dipasar sementara saat ini, terganggunya keindahan kota dan sebagainya. Sisi lain pembangunan yang dilakukan tersebut merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Namun dalam pembangunannya pasar Cik Puan mengalami berbagai permasalahan. Bangunan pasar yang rampung 40% dihentikan pembangunannya dibiarkan terbengkalai dan tidak terawat dengan baik hingga saat ini. Kondisi ini tentu membawa kerugian bagi masyarakat, pedagang maupun pemerintah sendiri, mengingat besarnya dana yang telah dikucurkan sebagaimana yang di sampaikan Walikota

Pekanbaru Firdaus MT beberapa tahun yang lalu (AntaraRiau,22-09-2016) bahwa pembangunan gedung pasar tradisional Cik Puan sampai selesai akan menghabiskan dana mencapai Rp 50 miliar. Sementara dana yang sudah dialokasikan sebesar Rp 20 miliar lebih yang dianggarkan pada APBD 2010- 2011 (<http://www.antarariau.com>). Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat melihat kondisi pembangunan pasar yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kompleksitas permasalahan tidak berarti bahwa hal tersebut akan menjadi suatu hambatan yang tidak dapat dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil pembangunan pasar Cik Puan jika perencana pembangunan dan pengambil kebijakan mampu mengatasinya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebijakan dengan mengidentifikasi masalah, alternatif kebijakan serta implementasi kebijakan yang dilakukan kedepannya

Kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Wiliam N Dunn (Harbani Pasolong,2014;39) merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan kemanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan James E.Anderson dalam Abdul Wahab Solichin (2001:2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selanjutnya Harbani Pasolong (2014:41-50) menjelaskan analisis kebijakan di bedakan atas : a) Identifikasi masalah b) Identifikasi alternatif kebijakan c) Seleksi alternatif kebijakan d) Pengusulan alternatif kebijakan untuk di implementasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota dalam menuntaskan Pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru. Serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya.

Metode

Penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi yang terkait dalam penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru serta pihak terkait lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Informan terdiri dari Pihak Pemerintah Kota, DPRD, BPKAD, Bappeda, Pedagang dan Masyarakat. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru digunakan 4(empat) indikator yang dijadikan alat ukur dalam pelaksanaannya.

Identifikasi Masalah

Mengenali masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Merumuskan kebijakan yang baik mesti harus mengenal dan mendefenisikan masalah dengan baik. Mulai dari mengidentifikasi isu-isu yang berkembang, sasaran isu yg berkembang. urgensi masalah yang terjadi, serta akibat dari masalah yang terjadi. *Ketidak seriusan pemerintah kota* dalam penuntasan

pembangunan pasar selama ini merupakan isu yang berkembang ditengah masyarakat. Dari informan yang diwawancarai dapat diperoleh informasi, bahwa sebenarnya Pemerintah Kota bukan tidak serius dalam menyelesaikan pembangunan namun terbentur dengan: 1) masalah kewenangan terhadap aset tanah pasar yang dimiliki pihak Pempro, namun dikerjakan pembangunannya oleh pihak Pemko, 2) komunikasi yang kurang baik antara pihak Pemprov dan Walikota pada awal pembangunan pasar, 3) Tdk adanya penyelesaian meski sudah melibatkan pihak Legislatif. Oleh karenanya isu adanya kelalaian atau ketidak seriusan pemerintah dapat dihilangkan jika Pemko dan Pemerintah Provinsi duduk secara bersama dalam waktu yang tidak berlarut-larut untuk mengatasi penyelesaian pembangunan pasar. Kemudian yang menjadi sasaran isu terhadap keterlambatan penyelesaian pembanguana pasar ini tentu pihak Pemko dan pihak Pemprov Riau. Selanjutnya identifikasi masalah berikutnya menyangkut *urgensi masalah*. Seberapa penting pembangunan pasar cik puan dilakukan, maka dari apa yang disampaikan oleh semua informan menyebutkan bahwa pasar cik puan sangat penting diselesaikan pembangunannya, mengingat selama ini masyarakat kita sangat bergantung pada keberadaan pasar tradisional. Artinya disini bahwa tidak ada yang menginginkan pembangunan pasar cik puan tidak dilanjutkan. Sedangkan identifikasi masalah selanjutnya adalah *akibat dari masalah*, yakni dampak yang timbul dari berlarutnya pembangunan. Dampak yang timbul diantaranya 1) nasib pedagang yang tidak jelas, pasar sekarang ini sifatnya sementara sehingga berdampak terhadap pendapatan para pedagang 2) kenyamanan dan keamanan pedagang dan pembeli terganggu mengingat kondisi pasar yang ada saat ini fasilitasnya tdk mendukung, TPS tidak memadai, lahan parkir tidak dimiliki ,3) PAD dari pasar tidak dapat dimaksimalkan penerimaannya,, 4) Banyaknya bermunculan pasar-pasar yang tidak resmi (pasar kaget) di wilayah Pekanbaru. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka sudah selayaknya pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengagendakan pelaksanaan pembangunan pasar cik puan dengan secepatnya dan tidak berlarut kembali.

Identifikasi Alternatif Kebijakan.

Sebelum menentukan alternatif kebijakan yang diambil, perlu diidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah pada pembangunan Pasar Cik Puan. Beberapa penyebab tidak selesainya pembangunan pasar yang terutama adalah masalah kepemilikan aset tanah dimana setelah pembangunan dilaksanakan dan dianggarkan melalui APBD Kota Pekanbaru, kemudian datanglah instruksi dari Pemprov Riau untuk menghentikan pembangunan tersebut. Informasi lain juga didapatkan bahwa meskipun Asetnya adalah milik Provinsi, namun pada tahun 1970 Gubernur pada waktu itu telah memberikan hak kelola kepada Pemerintah Kota untuk membangun pasar dan terminal demi perluasan kota. Jika kita berada pada tahun 2020 berarti sekitar 50 tahun dikelola pihak Pemko. Sebagaimana disampaikan oleh Informan bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria, jika sudah menguasai lebih dari 20 tahun, maka boleh diambil. Oleh karena itu semestinya Pihak Pemprov menyerahkan melalui hibah. Namun tidak dilakukan oleh pihak Pemprov. Argumentasi lain disampaikan Informan yang berbeda bahwa lahan milik pemerintah provinsi namun pengelolaan oleh Pemko sebenarnya tidak boleh, harus ada persetujuan terkait bagi hasilnya namun hal tsb tidak didapatkan dari Provinsi. Karena permasalahan tersebut belum tuntas konsekwensinya berdampak pada penghentian pembangunan pasar. Disamping itu juga adanya unsur-unsur politis penyebab terkendalanya pembangunan pasar cik puan. Setelah mengetahui penyebab masalah yang terjadi, maka perlu ditentukan berbagai alternatif kebijakan. Berbagai informasi

didapatkan alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini, ada 2 (dua) alternatif yakni dibangun atau tidak dibangun. Berdasarkan data yang didapatkan pada umumnya pihak Informan menjelaskan bahwa, pasar Cik Puan akan tetap dilanjutkan pembangunannya setelah permasalahan aset selesai, namun kapan waktunya belum dapat diketahui. Pandangan ini dikemukakan setelah melihat pergantian kepemimpinan kepala daerah Provinsi (Gubernur) mulai dari Gubernur HM Rusli Zainal, H. Annas Maamun, Arsyad Juliandi Rahman dan Syamsuar (2019 hingga sekarang). Alternatif bahwa pembangunan pasar Cik Puan akan dilanjutkan pembangunan setelah adanya pernyataan Pihak Pemko Pekanbaru melalui Sekdako M. Jamil yang mengatakan bahwa, Pembahasan kelanjutan Pembangunan Pasar Cik Puan akan dilakukan Pasca aset lahan pasar yang telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemko Pekanbaru pada tgl 30 April 2021 yang lalu. Pemko masih mengkaji apakah Pembangunan pasar tersebut akan diserahkan ke Investor atau kembali dibangun dengan APBD Kota Pekanbaru, kemudian pihak Pemko juga belum dapat memastikan terkait kapan dimulai kelanjutan pembangunan tersebut (Pekanbaru.go.id tgl 17 Mei 2021). Sementara itu Walikota Pekanbaru Dr. Firdaus MT mengungkapkan bahwa untuk pasar cik puan, pembahasannya masih awal, saat ini masih dalam proses pengurusan kepemilikan aset yakni Sertifikasi Tanah. Selesai sertifikasinya baru diujungi tender investasi dengan Pola Prakarsa/ Kerjasama pemerintah dengan Swasta, sehingga dengan Prinsip tersebut Pedagang akan untung, Pemerintah Untung dan Investor untung (Pekanbaru, Cakaplah, 11 September 2021).

Seleksi Alternatif Kebijakan.

Terdapat 2 (dua) alternatif kebijakan yang dimiliki, dilanjutkan pembangunannya atau tidak dilanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Informan penelitian didapatkan bahwa Paling efektif yang dilakukan pemerintah adalah melanjutkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, penyelesaian sengketa provinsi dan Pemko adalah solusi untuk mengatasi kemandekan pembangunan pasar selama ini, jika pasar bisa dibangun dan dimanfaatkan akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah. Pedagang akan bisa tertampung lebih banyak sehingga juga mempengaruhi terhadap penerimaan daerah. Begitu juga dengan melanjutkan pembangunan pasar akan dapat merubah pandangan masyarakat yang lebih baik kepada pihak Pemerintah Daerah.

Pengusulan Alternatif Kebijakan Untuk di Implementasikan.

Melalui penyerahan aset tanah yang dilakukan Pemprov Riau kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa bulan lalu, maka secara resmi saat ini kepemilikan aset tanah pasar Cik Puan berada pada Pemko Pekanbaru. Pasca penyerahan aset tersebut usulan mempercepat pembangunan pasar bergema sangat kuat ditengah-tengah masyarakat sebagaimana informasi yang didapatkan dari Informan. Kondisi ini sangat wajar mengingat pasar Cik Puan merupakan tempat yang banyak dikunjungi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun pembahasan pembangunan pasar masih awal pasca penyerahan aset ke Pemerintah Kota, sebagaimana disampaikan Walikota Firdaus namun karena terbengkalainya pembangunan pasar lebih dari satu dasawarsa, maka tanggung jawab yang dibebani kepada Pihak Pemerintah sangatlah besar, baik dari aspek hukum, kesejahteraan masyarakat, aspek keindahan kota dan sebagainya termasuk untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Pengurusan kepemilikan aset tanah Pasar Cik Puan melalui sertifikasi tanah merupakan salah satu

kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan berulang di kemudian hari.

Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa kendala yang utama dihadapi Pemerintah Kota selama ini adalah penyelesaian kepemilikan Aset. Pasca penyerahan aset kendala yang masih ada diantaranya, belum adanya pembahasan dengan pihak terkait seperti halnya DPRD , sehingga belum ada kebijakan tentang pendanaan apakah melalui APBD atau melalui pola Prakarsa/ kerjasama. Tender investasi masih tahap peninjauan serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa Pandemi. Perlu kajian ulang terhadap kondisi bangunan yang dibiarkan lebih dari satu dasa warsa.

Simpulan

Terhentinya pembangunan pasar dan kondisi yang tidak menimbulkan rasa aman dan nyaman merupakan suatu masalah yang urgen untuk segera di selesaikan oleh pemerintah, Kejelasan secara resmi kepemilikan aset tanah pasar oleh Pemerintah Kota saat ini menjadi landasan yang kuat untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian pembangunan pasar. Pemerintah Kota Pekanbaru akan melanjutkan pembangunan pasar namun belum dapat menentukan kapan pelaksanaan dimulai serta pola pembiayaan yang akan dilakukan masih belum jelas. Legalitas kepemilikan aset tanah pasar perlu didapatkan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Referensi

- Abdul Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan. *Bumi Aksara, Jakarta*
- Fred W.Riggs. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harbani Pasolong. 2014. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung
- Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ryan Nugroho. 2009. *Public Policy*. Alex Media Komutindo, Jakarta
- Saul M.Katz. 1992. Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta
- Sondang P.Siagian. 2003. Administrasi Pembangunan , Konsep. Dimensi Dan Strateginya. Bumi Aksara, Jakarta
- William N.Dunn. 1994. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta